

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi kriteria kualifikasi agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk memenuhi karakteristik kualifikasi, laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, penelaahan atas laporan keuangan perlu dilakukan untuk menilai keakuratan laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau tidak.

Berdasarkan inspeksi BPK RI terhadap laporan keuangan akan menghasilkan opini audit. Opini audit sendiri adalah konklusi berdasarkan inspeksi tentang taraf kewajaran fakta yang tersaji pada laporan keuangan. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini BPK RI diberikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Kesesuaian dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Kecukupan pengungkapan (*Adequate disclosure*),
4. Efektivitas sistem pengendalian internal.

Dari keempat kriteria tersebut memiliki pengaruh terhadap opini audit yang akan dikeluarkan oleh BPK RI terhadap LKPD yang bersangkutan.

Berdasarkan Standar Audit 700, auditor memiliki kewajiban untuk merumuskan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. BPK RI berperan sebagai auditor eksternal pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam menyusun laporan pemeriksaan tersebut BPK RI memiliki acuan berupa standar pemeriksaan PSP 300 yang berisi standar pelaporan pemeriksaan.

Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan berupa opini audit. Opini terbaik yang diberikan merupakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP menerangkan bahwa laporan keuangan telah tersaji secara wajar, tidak terdapat kesalahan material, dan sesuai standar. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berarti laporan keuangan masih wajar, tidak ada kesalahan material, sesuai dengan standar, namun masih ada catatan yang perlu diperbaiki.

Opini audit sendiri merupakan kesimpulan dari pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh sebab

itu, penulis ingin mengetahui kesesuaian opini audit BPK RI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penulisan KTTA ini berjudul “Analisis Opini dan Temuan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hasil opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara sudah sesuai kriteria penentuan opini pada UU No.15 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana kesesuaian antara pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara dengan Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan PSP 300 pada bagian ketentuan unsur LHP ?
3. Bagaimana kesesuaian pemberian opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara dengan Standar Audit 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah hasil opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara telah sesuai dengan kriteria penentuan opini pada UU No.15 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara dengan Standar

Pelaporan Pemeriksaan Keuangan PSP 300 mengenai unsur LHP atas LHP LK Pemda Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara pemberian opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara dengan Standar Audit 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi pembahasan hanya di dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penulis membahas tentang kesesuaian antara opini yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2016-2019 dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut

1. Untuk Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pengembangan ilmu di bidang Audit Sektor Publik khususnya pada analisis opini BPK terhadap LKPD.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tenggara

Bagi Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tenggara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat terus memperoleh opini audit yang sesuai untuk tahun-tahun selanjutnya

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II Memaparkan teori-teori yang mendasari topik pembahasan dalam karya tulis tugas akhir ini, yakni berupa teori tentang audit secara umum dan teori tentang pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III Berisi tentang uraian metode yang penulis gunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dan pembahasan yang menjadi inti dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yakni pembahasan tentang bagaimana prosedur pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam memeriksa laporan keuangan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2016-2019.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV Berisi simpulan dari hasil tinjauan dan analisis penulis terkait prosedur pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2016-2019. Apakah prosedur pemeriksaan laporan keuangan tersebut telah sesuai Standar atau belum.